



# DASAR-DASAR HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN



*Disampaikan Oleh:*  
**Bisman Bhaktiar, SH., MH., MM.**  
**Direktur Eksekutif**

# Perkenalan & Kompetensi

## **Bisman Bhaktiar, SH., MH., MM.**

- ❖ Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP).
- ❖ Advocate & Legal Consultant di JLP Law Firm.
- ❖ Saksi ahli di persidangan perkara sengketa pertambangan.
- ❖ Tenaga Ahli Komisi VII DPR RI (Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi) (2009-2019).
- ❖ Ketua Tim Ahli/Penyusun RUU Pertambangan Mineral dan Batubara (2015-2019).
- ❖ Ketua Tim Ahli/Penyusun RUU Minyak dan Gas Bumi (2010-2019).
- ❖ Pokja Omnibus Law dan Sekretaris Departemen Pertambangan, Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Tahun 2017-2022.
- ❖ Ketua Bidang Hukum & Advokasi, DPP Pengembang Indonesia, Tahun 2017-2022.
- ❖ Kompartemen Advokasi & Konsultasi Hukum, Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA), Tahun 2016-2021.
- ❖ Ketua Tim Hukum Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal Konstitusi Sumber Daya Alam, Tahun 2016-2018.

# KEKAYAAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA...?



# Cadangan Tambang Mineral logam PT FI

- **Total Cadangan** sebesar 2.079.323.000 Ton dengan kandungan:

- Emas (Au 0,86 g/t) = 1.784 Ton
- Perak (Ag 4,53 g/t) = 9.419 Ton
- Tembaga (Cu 1,05 %) = 21.832.894 Ton

- **Royalti**

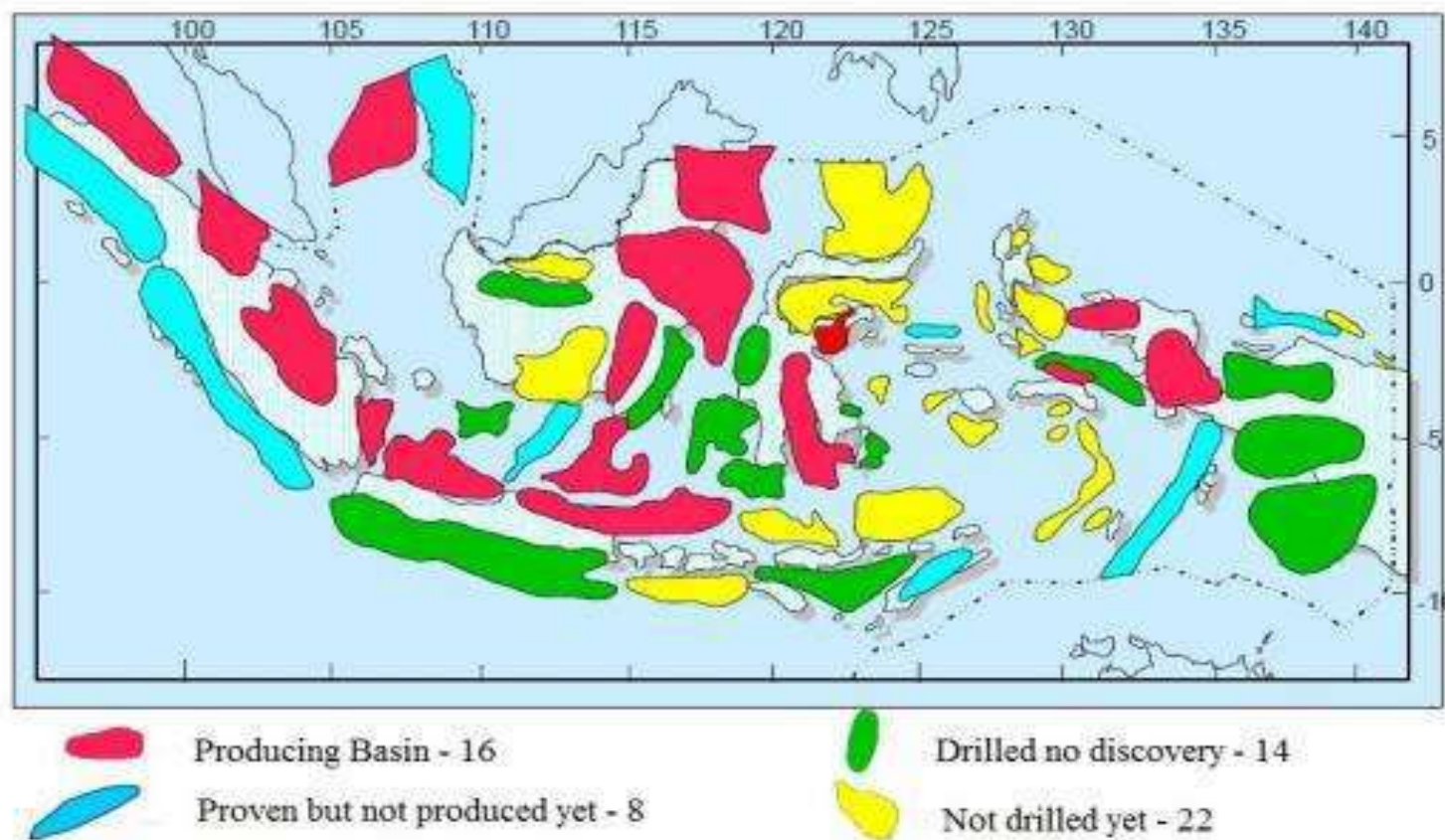
	Sebelum Juli 2014	Mulai Juli 2014
<b>EMAS</b>	<b>1 %</b>	<b>3,75 %</b>
<b>PERAK</b>	<b>1 %</b>	<b>3,25 %</b>
<b>TEMBAGA</b>	<b>3,5 %</b>	<b>4 %</b>



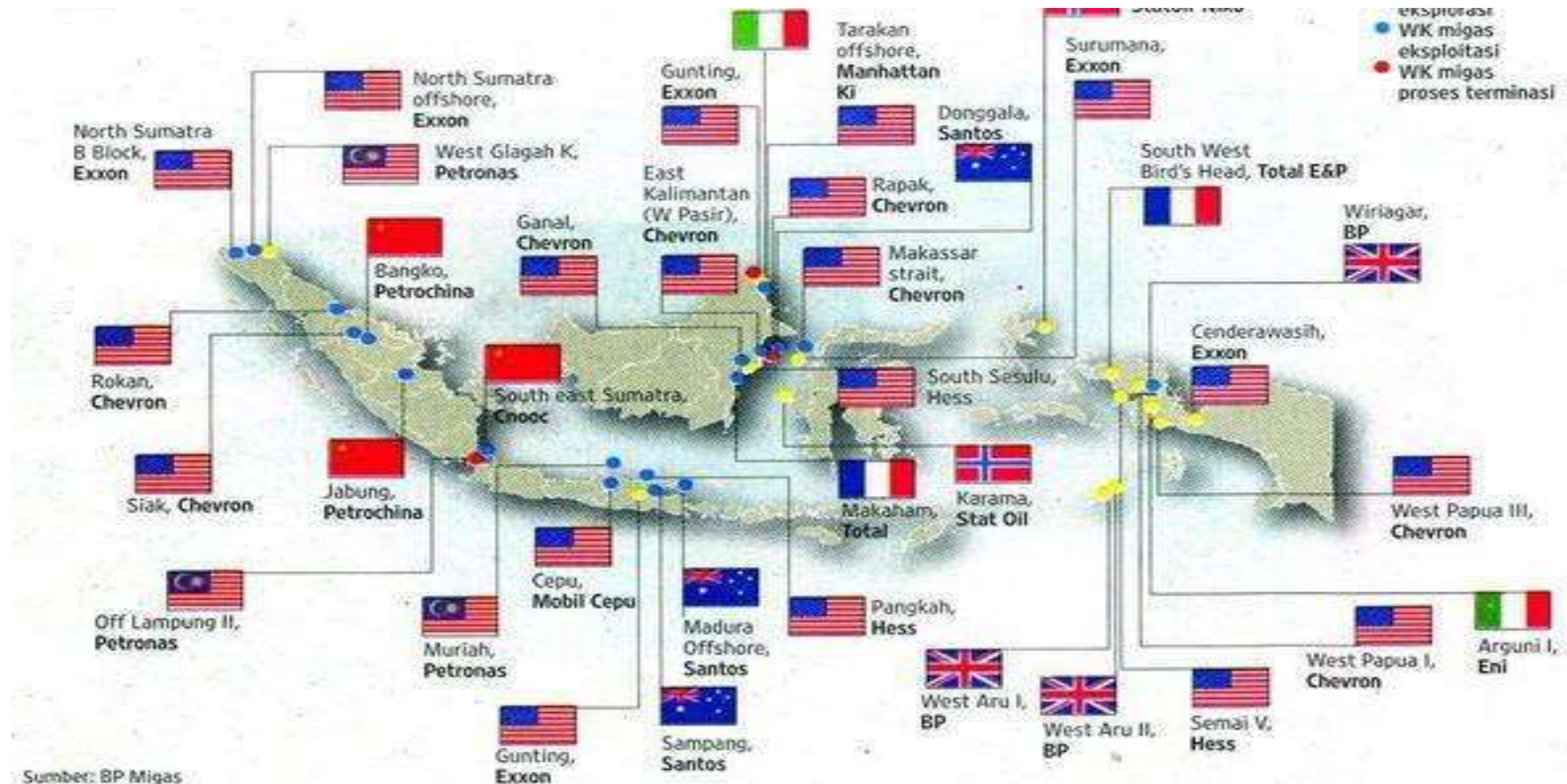
# KEKAYAAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA...?



PETA POTENSI MINYAK DAN GAS BUMI INDONESIA



# Peta Pengelolaan Migas Indonesia (sebelum alih kelola)



Sumber: BP Migas

# Kemiskinan & Kesenjangan



Warga yang kebanyakan para ibu tampak kelelahan dan berusaha untuk keluar dari kemiskinan. Reuters/Stringer.

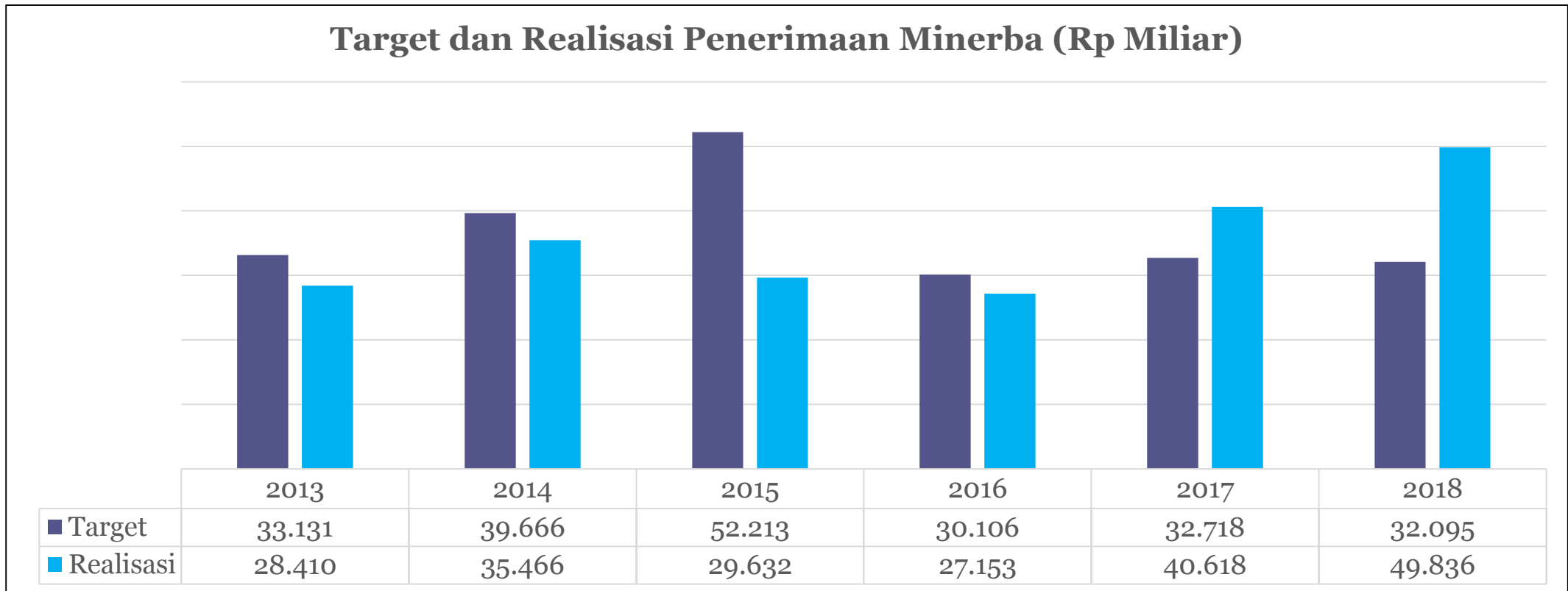


# Kerusakan Lingkungan Hidup





## PEMASUKAN NEGARA DARI PNBP SEKTOR MINERBA TH 2013-2018



Tahun 2019= Rp 44,8 T

# PENERIMAAN NEGARA SEKTOR MIGAS

## Data Penerimaan Migas (2012 - 2018)

Tahun	PPH Migas (Rp Triliun)	PNBP Migas dan DMO (Rp Triliun)	Total Penerimaan Migas (Rp Triliun)	Total Penerimaan Negara (Rp Triliun)	Porsi Penerimaan Migas Terhadap Total Penerimaan (%)
2012	83,5	218,1	301,6	1338	22,54
2013	88,7	216,6	305,3	1438,89	21,22
2014	87,4	232,3	319,7	1550,49	20,62
2015	49,7	85,4	135,1	1508	8,96
2016	36,1	48,6	84,7	1555,93	5,44
2017	49,4	88,6	138	1665	8,29
2018*	64,7	143,2	207,9	1942,3	10,70

Tahun 2019= Rp 161 T

# MASALAH KETAHANAN BBM NASIONAL (perbandingan dengan negara lain)

NEGARA	JUMLAH PENDUDUK	KONSUMSI BBM	LIFTING	KAPASITAS KILANG	CADANGAN BBM
SINGAPURA	4.701.069	1.255ribu bph	-	1.395 ribu bph	90 Hari
MALAYSIA	28.274.729	697 ribu bph	657 ribu bph	722 ribu bph	25 Hari
CHINA	1.330.141.295	10.221ribu bph	4.155 ribu bph	11.547 ribu bph	90 Hari
AMERIKA	310.232.863	18.555 ribu bph	8.905 ribu bph	17.388 ribu bph	260 Hari
INDONESIA	242.968.342	1.865 ribu bph	718 ribu bph	1.142 ribu bph	22 Hari*

Sumber: bp statistical review

\* Milik PT Pertamina (Persero)

# **PENGUASAAN NEGARA ATAS SUMBER DAYA ALAM**



# Konstitusi UUD Negara RI Tahun 1945

Pasal 33 ayat (2)

*“Cabang-cabang produksi yang **penting bagi negara** dan yang **menguasai hajat hidup orang banyak** dikuasai oleh negara.”*

Pasal 33 ayat (3)

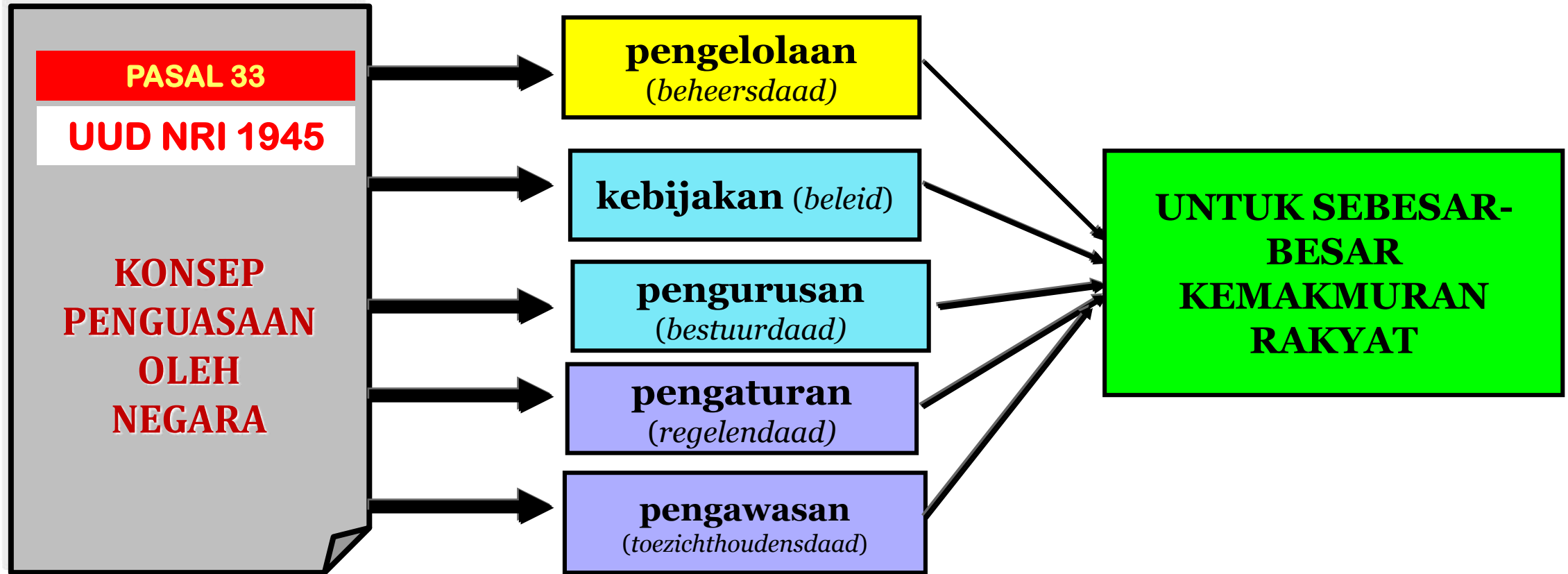
*“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya **dikuasai oleh negara** dan dipergunakan **untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat**”*

Pasal 33 ayat (4)

*“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.*

# Penguasaan Negara Menurut Konstitusi

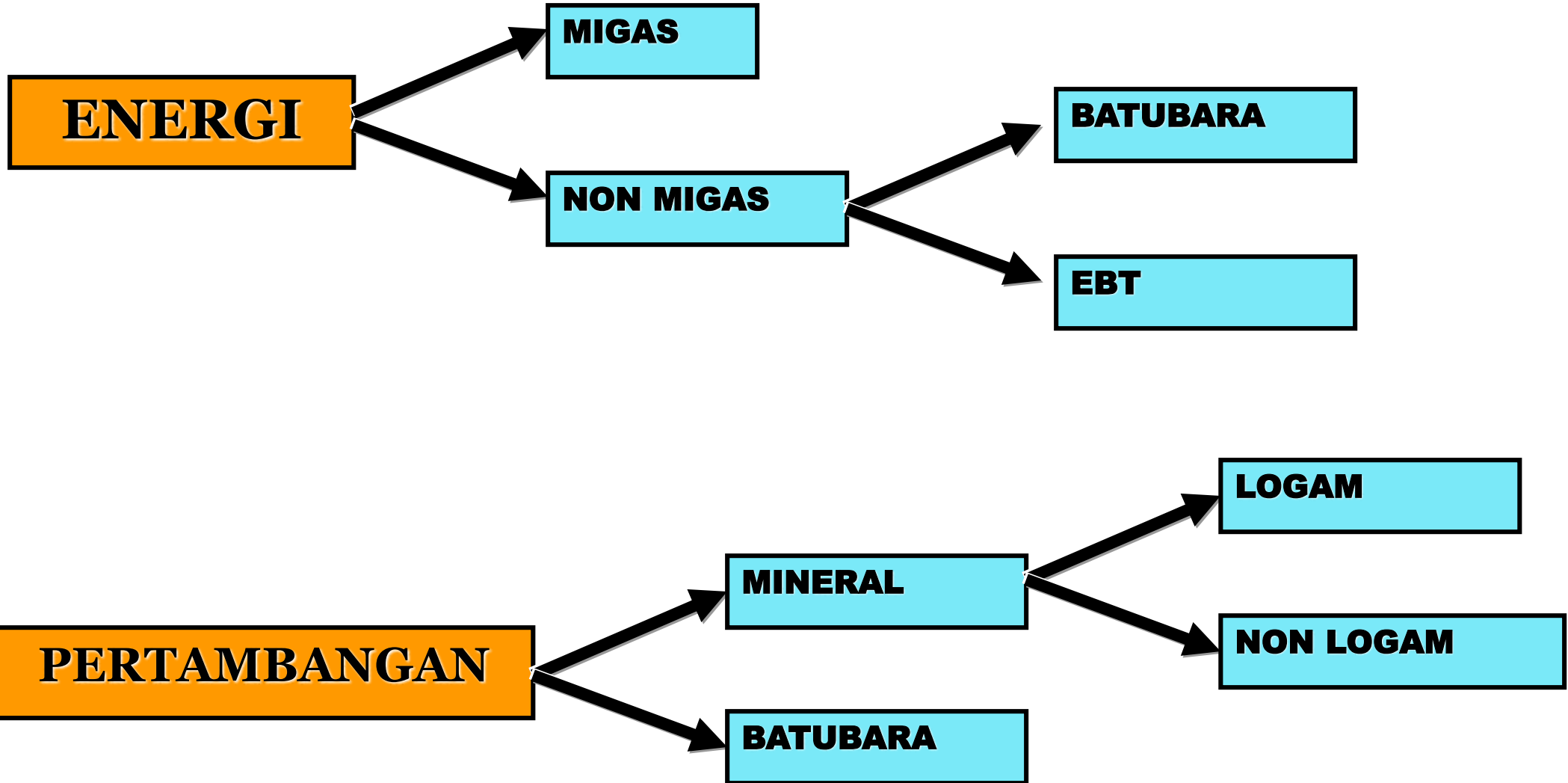
(Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi)



Menurut MK (Putusan Nomor 36/PUU-X/2012) : “**bentuk penguasaan negara peringkat pertama dan yang paling penting adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung**” (pemilikan saham dan/atau keterlibatan langsung dalam manajemen)

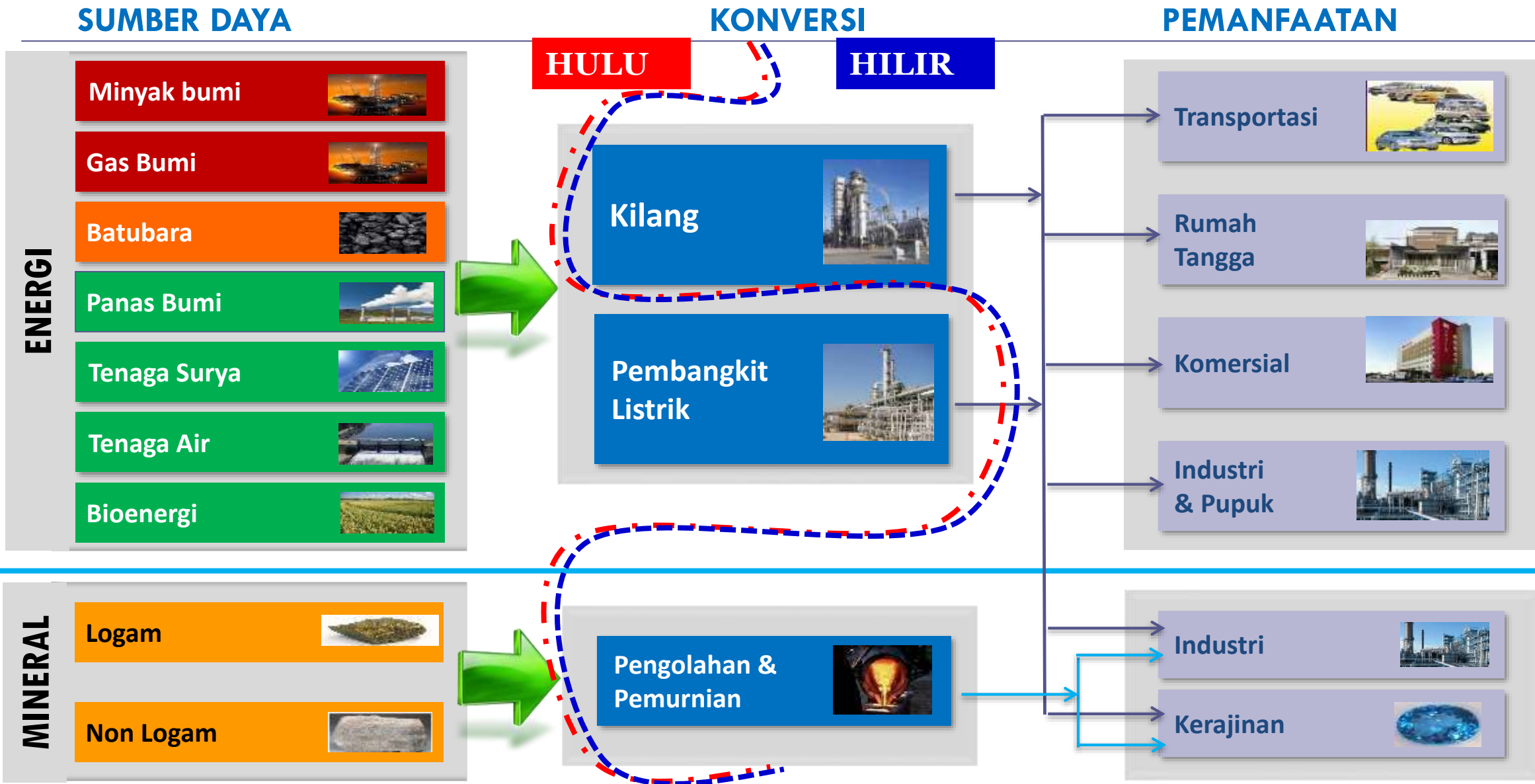
# **PENGANTAR ENERGI & PERTAMBANGAN**

# POSISI

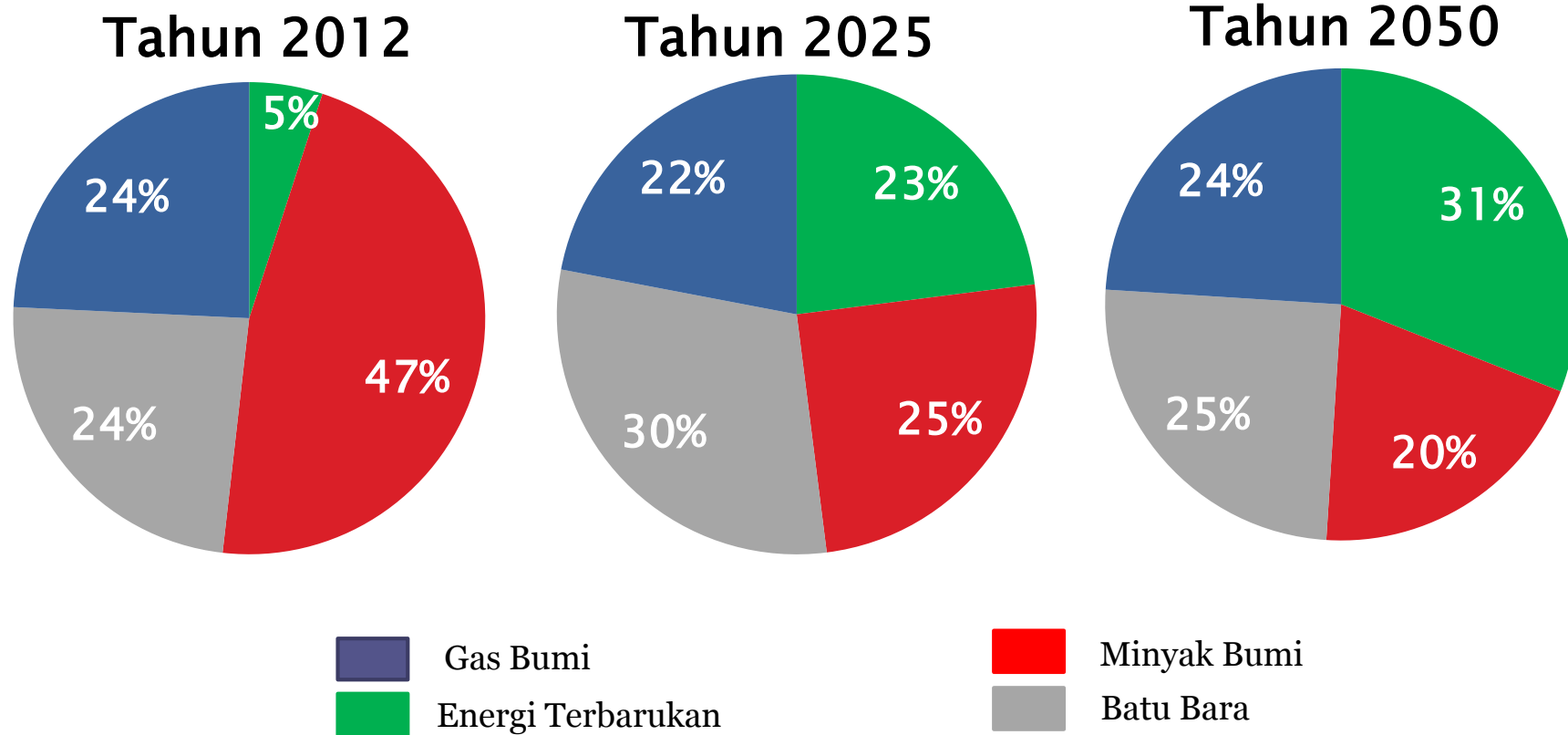




# Ruang Lingkup Energi & Pertambangan



MIGAS MASIH MEMEGANG PERANAN PENTING SEBAGAI SUMBER ENERGI DI MASA MENDATANG,  
PROYEKSI PEMANFAATAN ENERGI DALAM KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL



# HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN

# Konstruksi Hukum Tata Kelola Energi & Pertambangan

**KONSTITUSI  
UUD NRI 1945 PASAL 33**

**UU 30 Tahun 2007  
tentang Energi**

**UU 22 Tahun 2001 tentang  
Minyak dan Gas bumi**

**UU 4 Tahun 2009 Jo. UU 3 Tahun 2020 tentang  
Pertambangan Mineral dan Batubara**

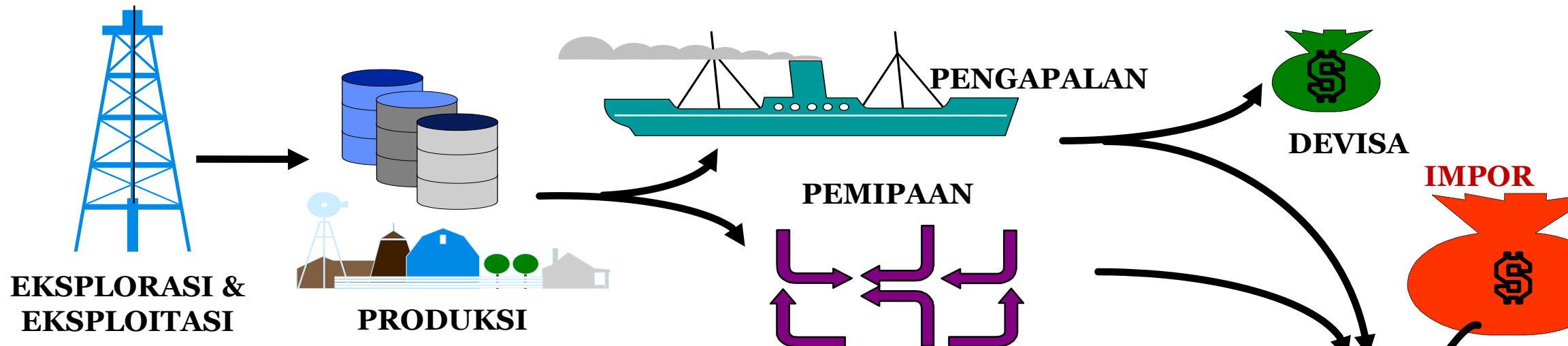
**UU 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi**

**UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan**

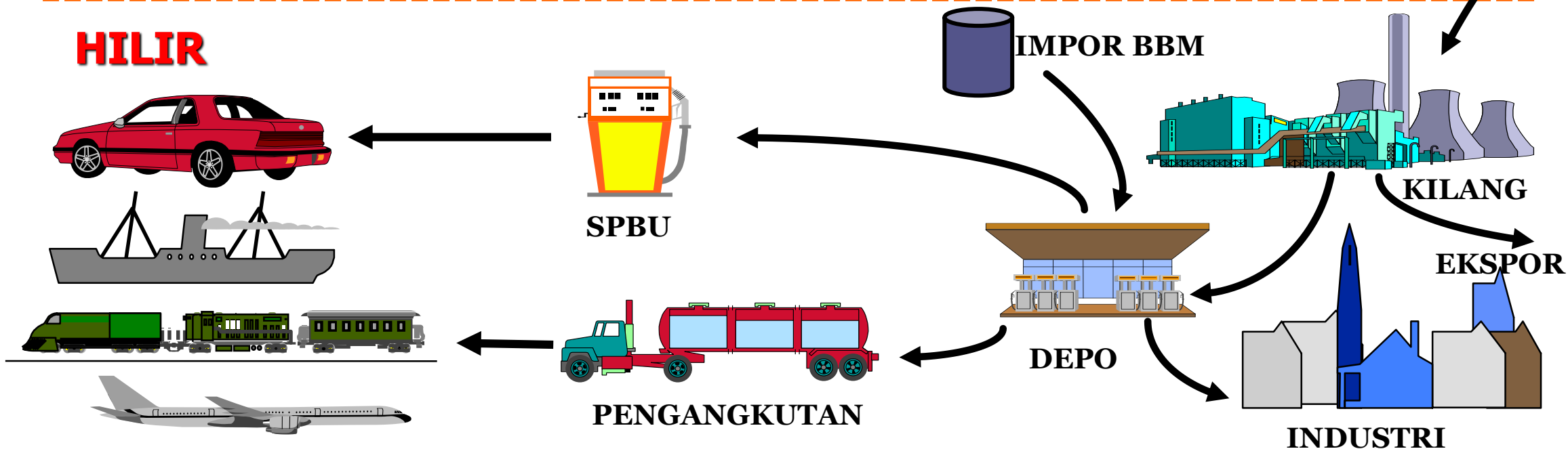
**MIGAS**

# ALUR INDUSTRI MIGAS

## HULU



## HILIR



# TAHAPAN DAN PELAKU KEGIATAN USAHA MIGAS

**MESDM/DIRJEN MIGAS:** Menyelenggarakan Urusan Kepemerintahan, Menetapkan Kebijakan, dan Mengawasi Kepatuhan Terhadap Peraturan Yang Berlaku.

## DITJEN MIGAS

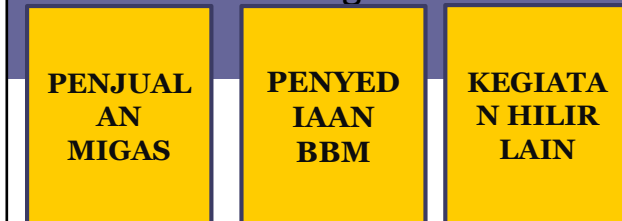
**SKK Migas :** Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama.

**BU/BUT (Perusahaan Migas):** Melakukan Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi

**BPHMIGAS:** Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

**PERTAMINA (BUMN) :** Melakukan Penyediaan dan Distribusi BBM Subsidi.

**BU:** Melakukan Kegiatan Usaha



**KEGIATAN USAHA HULU**

**KEGIATAN USAHA HILIR**

# TAHAPAN KEGIATAN HULU MIGAS BERDASARKAN PSC

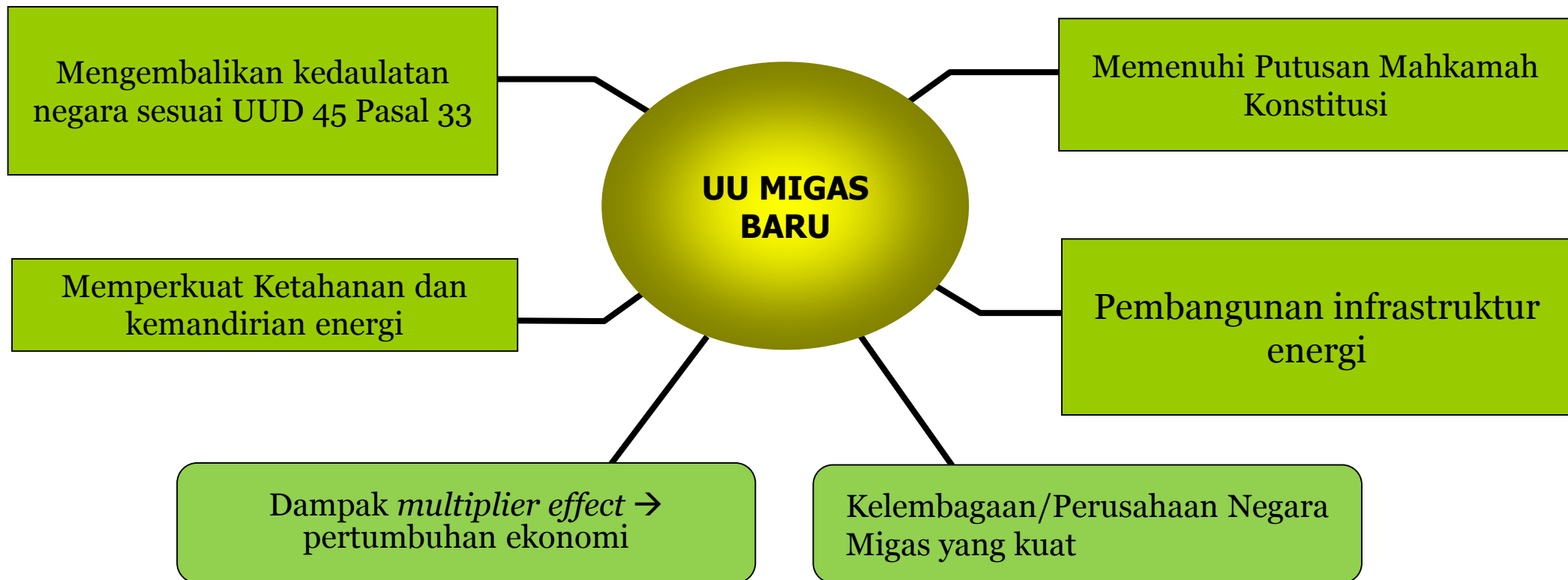


Kontraktor mengeluarkan biaya investasi atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas, dengan tujuan agar memperoleh produksi migas dari suatu wilayah kerja tersebut .

- ➔ Apabila wilayah kerja tersebut berproduksi secara komersial, maka seluruh biaya yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh Kontraktor dan biaya operasi tahun berjalan, dapat dikembalikan (*di-cost recovery*) dari hasil produksi wilayah kerja tersebut
- ➔ Apabila wilayah kerja tersebut tidak berproduksi, maka seluruh biaya yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh Kontraktor, masih ditanggung oleh Kontraktor



## Apa Yang Diharapkan dari Tata Kelola Migas Baru



# **MINERAL DAN BATUBARA**

# **Perjalanan Pengaturan Pertambangan di Indonesia**

**Indische Mijn Wet (IMW) 1899 (UU Pertambangan Hindia Belanda) dengan beberapa kali perubahan pada tahun 1910 dan tahun 1918**

**Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 37 Tahun 1960 Tentang Pertambangan**

**Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan**

**Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**

**Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**

# TAHAPAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERA



# TATA KELOLA PERTAMBANGAN INDONESIA

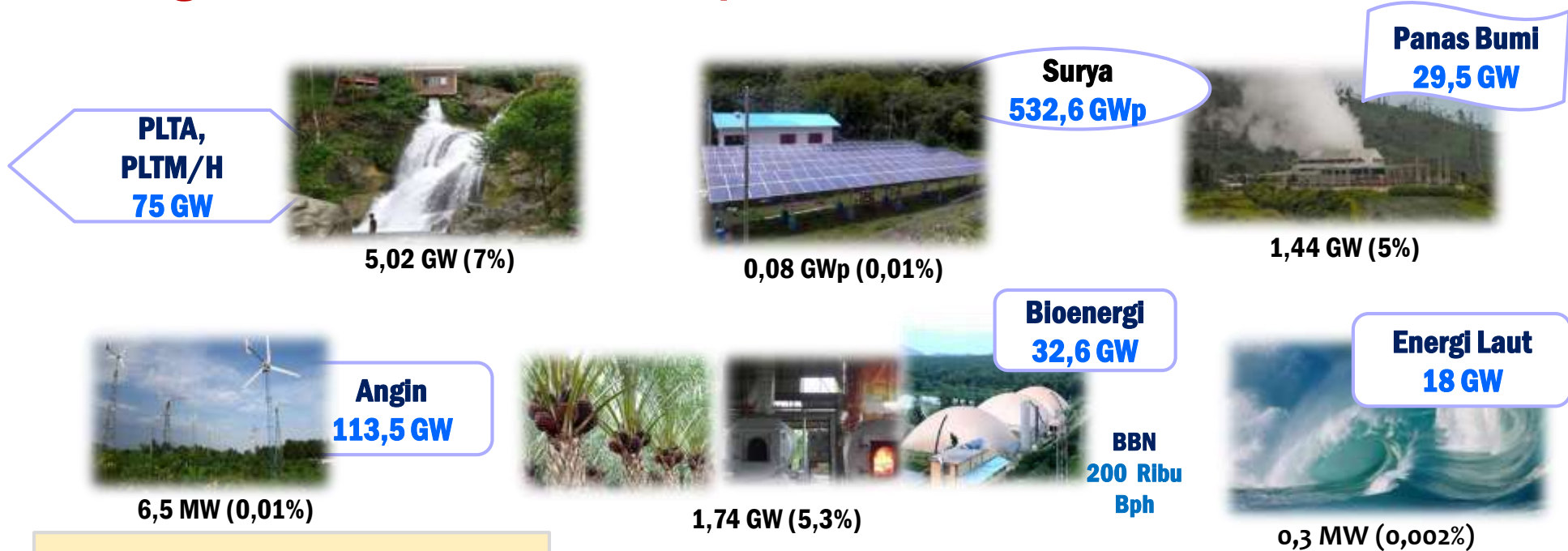


# Pelaku Usaha Pertambangan



# **ENERGI BARU & TERBARUKAN**

# Potensi Energi Terbarukan – Masa Depan



## Energi Fosil

### Cadangan terbukti:

- Minyak Bumi : 3,6 miliar barel
- Gas Bumi : 100,3 TSCF

### Produksi:

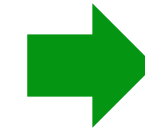
- Minyak Bumi : 288 Juta barel
- Gas Bumi : 2,97 TSCF

### Diperkirakan akan habis:

- Minyak Bumi : 13 tahun
- Gas Bumi : 34 tahun

**801,2 GW**

**8,66 GW**



Pemanfaatan  
EBT belum  
optimal

Kapasitas terpasang  
Pembangkit saat ini

**55.528 MW**

Rencana  
Pembangunan Pembangkit

**35.000 MW**  
**+7.500 MW**

New project  
On going project



# KONSTRUKSI KONSTITUSI DAN LEGISLASI YANG MENGATUR TENTANG EBT

## UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA RI TAHUN 1945

### Pasal 33 ayat 3

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat"

**UU 30 Tahun 2007**

**Energi**

**UU 21 Tahun 2014**

**Panas Bumi**

**UU 10 Tahun 1997**

**Tentang Ketenaganukliran**

**UU 41 Tahun 1999 jo  
UU 9 Tahun 2004**

**Kehutanan**

**UU 5 Tahun 1990**

**Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya**

**UU 32 Tahun 2014**

**Kelautan**

**UU 27 Tahun 2007 jo**

**UU 1 Tahun 2014  
Pengelolaan Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau Kecil**

### Pasal 33 ayat 2

"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara & menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara"

**UU 30 Tahun 2009**

**Ketenagalistrikan**

### Pasal 28 H

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir & batin, bertempat tinggal & mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.."

**UU 32 Tahun 2009**

**Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup**

**UU 18 Tahun 2008  
Pengelolaan Sampah**

**UU 16 Tahun 2016  
Ratifikasi Paris Agreement**

### Pasal 23 A

"Pajak & Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang"

**UU 7 Tahun 1983 jo.  
UU 36 Tahun 2008**

**Pajak Penghasilan**

**UU 10 Tahun 1995 jo.  
UU 17 Tahun 2006**

**Kepabeanaan**

**UU 39 Tahun 2014**

**Perkebunan**

### Pasal 23 C

"Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan Undang-Undang"

**UU 17 Tahun 2003**

**Keuangan Negara**

**Peraturan pelaksanaan turunan dari UU dalam bentuk PP, Perpres, dan Permen serta Perda**

# Kebijakan Pengembangan EBTKE



**Menambah kapasitas terpasang pembangkit/produksi energi;**

Pertumbuhan energi berkisar 8% per-tahun, diperlukan penambahan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan energi



**Menambah penyediaan akses terhadap energi modern untuk daerah terisolir jaringan PLN, khususnya di daerah-daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan;**

Penyediaan listrik/energi perdesaan yang tengah dikembangkan melalui pemanfaatan mikrohidro, surya, biomassa, biogas dan tenaga angin



**Mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil;**

Substitusi PLTD dengan bahan bakar nabati/biodiesel secara bertahap dan PLT Hybrid



**Kampanye Penghematan Energi Nasional;**

Menghemat energi sebesar 1 kWh lebih murah dan mudah dibandingkan dengan memproduksi energi sebesar 1 kWh



**Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca;**

Peningkatan efisiensi energi dan pemanfaatan energi baru terbarukan meminimalkan emisi GRK

# Tantangan & Masalah Pengembangan EBT

NO	MASALAH/TANTANGAN	SEKTOR
1	Pengadaan lahan	Pertanahan
2	Biaya Investasi Awal	Keuangan
3	Akses kepada teknologi yang efisien	Ristek
4	Akses kepada Infrastruktur jaringan transmisi & distribusi listrik	ESDM
5	Akses kepada pendanaan yang murah	Keuangan
6	Harga Jual / harga keekonomian yang wajar	ESDM
7	Perizinan	Multi Sektor
8	Skema Kerja sama (BOOT kurang menarik?)	ESDM
9	Kerja sama & Dukungan internasional	Luar Negeri

**LISTRIK**

# DASAR HUKUM PERENCANAAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

## UU 30/2007 ENERGI

### KEN

#### (PP 79/2014 ttg KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL)

- Pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip keadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
- Disusun oleh **DEWAN ENERGI NASIONAL (DEN)** (Pasal 12 ayat 2 UU 30/2007)
- Ditetapkan **PEMERINTAH** setelah mendapatkan persetujuan **DPR-RI** (Pasal 11 ayat 2 UU 30/2007)

### RUEN

#### (PERPRES 22/2017 ttg RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL)

- Rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan KEN.
- Disusun oleh **PEMERINTAH** dan ditetapkan oleh **DEN** (Pasal 12 ayat 2 & Pasal 17 UU 30/2007)

### RUED

#### RENCANA UMUM ENERGI DAERAH

Disusun oleh **PEMDA** berdasarkan **RUEN** dan ditetapkan dengan **PERDA** (Pasal 18 UU 30/2007)

## UU 30/2009 KETENAGALISTRIKAN

### PP 14/2012 jo PP 23/2014 KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

### RUKN

#### (RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN NASIONAL)

- Dokumen indikatif perencanaan ketenagalistrikan nasional
- Disusun oleh **PEMERINTAH** berdasarkan **KEN** dengan mengikutsertakan **PEMDA** (Pasal 7 ayat 1 & 2 UU 30/2009)
- Ditetapkan oleh **MENTERI ESDM** setelah konsultasi dengan **DPR RI** (Pasal 8 ayat 4 PP 23/2014)

### RUKD

#### (RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH)

- Dokumen indikatif perencanaan ketenagalistrikan daerah
- Disusun oleh **PEMDA** berdasarkan **RUKN** (Pasal 7 ayat 3 UU 30/2009)
- Ditetapkan oleh **GUBERNUR** setelah konsultasi dengan **DPRD** (Pasal 7 ayat 3 UU 30/2009)

### RUPTL

#### (PLN DAN NON PLN)

- Dokumen perencanaan lebih detail, terdiri dari daftar proyek pembangkit, penyaluran, dan penjualan tenaga listrik.
- Dasar pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum
- Disusun oleh **BADAN USAHA** yang memiliki **WILAYAH USAHA**
- Disusun dengan memperhatikan **RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN (RUK)**<sup>\*)</sup> (Pasal 14 ayat 1 PP 23/2014)
- Disahkan oleh **MENTERI/GUBERNUR** sesuai kewenangannya (Pasal 14 ayat 2)

# INSTALASI PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK

PUSAT LISTRIK TENAGA

( PLTA, PLTU, PLTG, PLTN, PLTD, PLTPB ) dsb.



PLTA



PLTU

Instalasi Penyediaan  
Tenaga Listrik

Gardu Tiang

JTR

SR

Saluran Transmisi

JTM

Gardu Induk

PHB  
Utama

APP

PHB 1

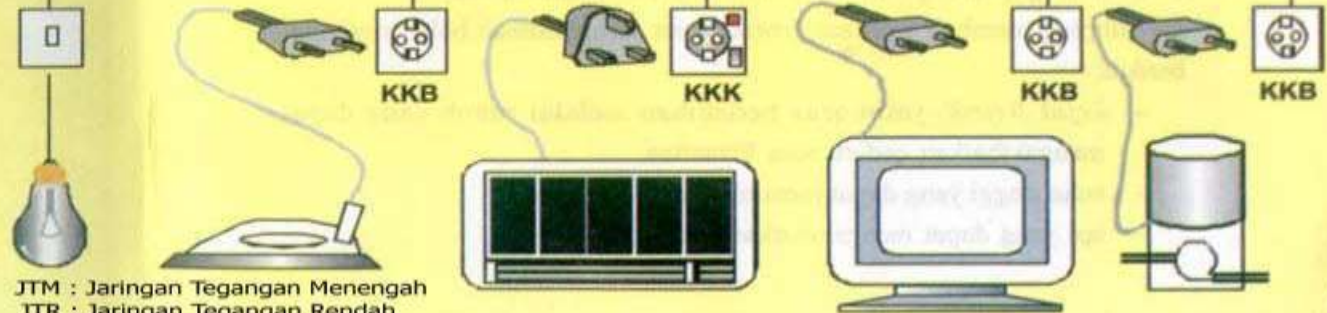
PHB 2

Instalasi Pemanfaatan  
Tenaga Listrik

Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik  
(Instalasi Pelanggan Besar)

PHB : Panel Hubung Bagi  
APP : Alat Pengukur dan Pembatas  
KKB : Kotak Kontak Biasa  
KKK : Kotak Kontak Khusus

JTM : Jaringan Tegangan Menengah  
JTR : Jaringan Tegangan Rendah  
SR : Saluran Rumah





*Terima Kasih*

**Bisman Bhaktiar, SH., MH., MM.**

✉ **bismanb@gmail.com**

☎ **081315151123**



**[www.pushep.or.id](http://www.pushep.or.id)**

**Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan**

*"untuk energi & pertambangan yang berlandaskan hukum dan keadilan"*



**hukumenergi\_pertambangan**



**Hukum Energi Dan Pertambangan**



**Pushep Hukum Energi dan  
Pertambangan**



**Pushep - Pusat Studi Hukum  
Energi & Pertambangan**



**@hukumenergi**